

## Proses pengadaan PNS di daerah pemekaran : studi kasus di Kabupaten Nagan Raya Provinsi NAD

Teuku John Merly Betra, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=81377&lokasi=lokal>

---

### Abstrak

Otonomi Daerah sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 merupakan "momentum" bagi daerah untuk lebih leluasa mengurus rumah tangganya sesuai dengan aspirasi masyarakat lokal, dengan mengacu pada Undang-Undang tersebut, maka untuk memaksimalkan penyelenggaraan pemerintah di daerah Nanggroe Aceh Darussalam dibentuklah satu kabupaten baru yaitu Kabupaten Nagan Raya sebagai daerah pemekaran dari Kabupaten Aceh Barat. Sehingga dengan adanya pemekaran tersebut Pemerintah NAD dapat memaksimalkan pelayanan terhadap kepentingan masyarakat lokal serta terciptanya pemerataan pembangunan di berbagai daerah khususnya Kabupaten Nagan Raya.

Dengan adanya pemekaran ini, maka dengan sendirinya Kabupaten Nagan Raya membutuhkan kelembagaan ataupun Struktur Organisasi yang sesuai dengan kebutuhan daerah itu sendiri. Adapun pembentukan Struktur Organisasi itu sendiri ditentukan oleh kebutuhan Pelayanan Dasar (Basic Services) dan kebutuhan pengembangan potensi-potensi unggulan khas (Core Competences) yang dimiliki daerah. Dengan adanya pembentukan Struktur Organisasi baru di Kabupaten Nagan Raya, maka dengan sendirinya dibutuhkan pula penambahan Sumber Daya Manusia yaitu Pegawai Negeri Sipil sebagai aparatur daerah untuk dapat mengisi kekosongan formasi yang ada.

Dalam menentukan kebutuhan akan sumber daya manusia, Pemda melakukan analisis terhadap kebutuhan yang diawali dengan menganalisis jabatan sebagai dasar penentuan lowongan formasi. Tahap selanjutnya adalah merekrut sumber daya manusia yang handal untuk dapat menjalankan roda pemerintahan di kabupaten tersebut, hal ini tentu saja berkaitan dengan terjadinya pembengkakan organisasi dimana banyak formasi yang terbentuk mulai dari tingkat kabupaten sampai pada tingkat kecamatan.

Langkah yang ditempuh untuk mengatasi kekosongan formasi tersebut adalah dengan melakukan rekrutment pegawai mulai dari perencanaan, pengumuman, pelamaran, penyaringan serta pengangkatan calon Pegawai Negeri Sipil sampai dengan pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil. Dalam penyeleksian calon Pegawai itu sendiri menitik beratkan pada faktor pendidikan, ketrampilan, jenis/beban pekerjaan, serta jenis kelamin dan usia.

Penelitian ini menggunakan model pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptis dengan tujuan mendeskripsikan pelaksanaan pengadaan Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Nagan Raya. Adapun data yang diperoleh dalam tesis ini adalah melalui wawancara dengan 7 (tujuh) informan dan studi pustaka.

Dari hasil penelitian dapat dilihat bahwa pengadaan PNS melalui rekrutment ini didasarkan pada Struktur Organisasi Tata Kerja Yang ada di Kabupaten Nagan Raya, dan upaya yang dilakukan oleh pemda Nagan

Raya dalam penerimaan PNS yang baru ini adalah untuk mendapatkan Pegawai Negeri Sipil yang berkualitas. Namun hambatan yang dihadapi untuk mengisi formasi yang ada pada Struktur Organisasi tersebut adalah adanya keterbatasannya formasi yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dalam hal ini BKN terhadap penerimaan PNS di Kabupaten Nagan Raya.

Dengan adanya penerimaan PNS di Kabupaten Nagan Raya, maka diharapkan akan terciptanya aparatur daerah yang handal dan mampu menjalankan roda pemerintahan di daerah tersebut. Mengenai kekurangan pegawai yang dihadapi, sementara dapat direkrut pegawai honorer untuk menutupi kekosongan formasi yang ada.